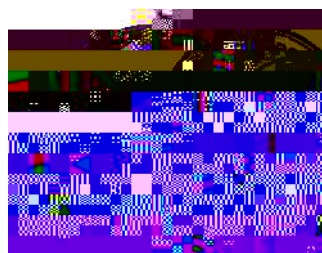


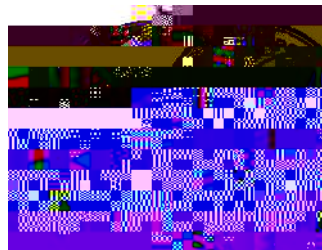
5. Undang-

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3



Lampiran I :

Lampiran II : Keputusan Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi



4) Tugas dan



